

ABSTRAK

Kerugian secara fiskal yang dialami PT Pos Indonesia (Persero) sepanjang tahun pajak 2001-2005 mendorong perusahaan melakukan penghematan pajak. Dengan memanfaatkan ketentuan khusus peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan Ditjen Pajak, PT Pos Indonesia (Persero) mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan PPh oleh pihak lain.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23, PT Pos Indonesia (Persero) tidak lagi dipungut dari tiga belas layanan jasa keagenan yang terdapat dalam pendapatan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa fakta yang dibutuhkan pada PT Pos Indonesia (Persero), untuk kemudian diolah menjadi data, disajikan dan dilakukan analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas obyek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan. Data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis statistik *Paired Sample T Test*, yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel dari sebuah kelompok tunggal. Pengujian ini akan menghitung perbedaan antara nilai dari dua variabel untuk setiap kasus dan kemudian menguji perbedaan rata-ratanya.

Adapun hipotesis yang penulis rumuskan adalah “Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.”

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada PT Pos Indonesia (Persero) diketahui bahwa taraf nyata 5%, nilai t hitung atau t_0 sebesar -3,466 lebih kecil dari $t_{0,025,9}$ sebesar -2,262 sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan SKB PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) telah berhasil dengan baik.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) telah memanfaatkan peluang perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan baik, sehingga pendapatan usaha perusahaan menjadi lebih besar.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	11
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak.....	14
2.1.1 Pengertian Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak.....	16

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.4 Pengelompokkan Pajak.....	21
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	24
2.1.7 Tarif Pajak.....	25
2.2 Pajak Penghasilan.....	27
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	28
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan.....	34
2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan.....	39
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	41
2.3.1 Pemotong PPh Pasal 23.....	41
2.3.2 Subjek Pemotongan PPh Pasal 23.....	43
2.3.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	43
2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	44
2.3.5 Tarif dan Objek PPh Pasal 23.....	45
2.3.6 Cara Menghitung PPh Pasal 23.....	46
2.3.6.1 Atas Dividen.....	46
2.3.6.2 Atas Bunga, termasuk Premium, Diskonto, dan Imabalan Sehubungan Dengan Jaminan Pengembalian Utang.....	46
2.3.6.3 Atas Royalti.....	46
2.3.6.4 Atas Hadiah dan Penghargaan.....	47
2.3.6.5 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan	

Dengan Penggunaan Harta.....	47
2.3.6.6 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan Hukum, Jasa Konsultan Pajak, dan Jasa Lain.....	48
2.4 Manajemen Pajak.....	54
2.4.1 Pengertian Manajemen Pajak.....	54
2.4.2 Tujuan Manajemen Pajak.....	54
2.4.3 Fungsi-fungsi Manajemen Pajak.....	55
2.4.4 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	56
2.5 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan.....	60
2.5.1 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 mengenai Wajib Pajak Yang Berhak Mendapat SKB.....	60
2.5.2 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Kerugian Fiskal.....	61
2.5.3 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 mengenai Kompensasi Kerugian.....	62
2.5.4 PPh yang Telah Dibayar Lebih Besar dari PPh yang Akan Terutang.....	64
2.5.5 Prosedur Permohonan SKB menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002.....	65
2.5.6 Prosedur Penerbitan SKB menurut Keputusan Dirjen	

Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002.....	66
2.5.7 Prosedur Penolakan Permohonan SKB PPh Pasal 23.....	67
BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN.....	69
3.1 Objek Penelitian.....	69
3.1.1 Sejarah Singkat PT Pos Indonesia (Persero).....	69
3.1.2 Tugas, Fungsi, dan Kegiatan Perusahaan.....	72
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	76
3.3 Metode Penelitian.....	85
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	86
3.3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	87
3.3.3 Analisa Pengujian Hipotesis.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1 Penghasilan Dikenakan SKB PPh Pasal 23.....	92
4.2 Pendapatan Usaha PT Pos Indonesia (Persero).....	95
4.2.1 Pengakuan Pendapatan.....	95
4.2.2 Pendapatan Layanan PT Pos Indonesia (Persero).....	96
4.2.3 Pendapatan Usaha Berupa Provisi Lainnya.....	98
4.2.3.1 Pendapatan Provisi Penyaluran Dana	
BLT-RTM.....	98
4.2.3.2 Pendapatan Usaha Berupa Provisi Lainnya.....	99

4.3 Perhitungan Pendapatan Usaha Neto Dari Provisi Tahun 2006	
Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB PPh Pasal 23.....	100
4.3.1 Asumsi Aspek Lain Yang Mempengaruhi.....	114
4.4 Pengujian Hipotesis.....	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Table 2.1 Kewajiban Pajak Subjektif	31
Tabel 2.2 Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif	32
Tabel 2.3 Tarif Pajak WP Orang Pribadi Dalam Negeri	39
Tabel 2.4 Tarif Pajak WP Badan Dalam Negeri dan BUT	40
Tabel 4.1 Data Pendapatan Provisi Jasa Keagenan Januari-Mei Tahun 2005 dan 2006	101
Tabel 4.2 Provisi Meterai Januari s/d Mei 2006 Sebelum & Sesudah Penerapan SKB	102
Tabel 4.3 Provisi Setoran Ditjen Pajak & Lainnya Januari s/d Mei 2006 Sebelum & Sesudah Penerapan SKB	103
Tabel 4.4 Provisi Angsuran Kredit BRI Januari s/d Mei 2006 Sebelum & Sesudah Penerapan SKB	104
Tabel 4.5 Provisi Angsuran Kredit BTN Januari s/d Mei 2006 Sebelum & Sesudah Penerapan SKB	105
Tabel 4.6 Provisi Angsuran Kredit BTPN Januari s/d Mei 2006 Sebelum & Sesudah Penerapan SKB	106
Tabel 4.7 Provisi Tabungan BTN Januari s/d Mei 2006 Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB	107
Tabel 4.8 Provisi Setoran Telepon Januari s/d Mei 2006 Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB	108
Tabel 4.9 Provisi ASABRI Januari s/d Mei 2006 Sebelum dan Sesudah	

	Penerapan SKB	109
Tabel 4.10	Provisi TASPEN Januari s/d Mei 2006 Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB	110
Table 4.11	Provisi Akta Agraria Januari s/d Mei 2006 Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB	111
Tabel 4.12	Perbandingan Pendapatan Usaha Berupa Provisi Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB Tahun 2006	115
Tebel 5.1	Perbandingan Pendapatan Usaha Berupa Provisi Sebelum dan Sesudah Penerapan SKB Tahun 2006	120

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero)	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Tabel B. – Distribusi T
Lampiran II	:	Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern
Lampiran III	:	Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan
Lampiran IV	:	Struktur Organisasi Direktorat Operasi
Lampiran V	:	Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Manusia
Lampiran VI	:	Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Lampiran VII	:	Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21 / PPh Pasal 23
Lampiran VIII	:	Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Bendaharawan
Lampiran IX	:	Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Lampiran X	:	Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh
Lampiran XI	:	Daftar Pemberi Penghasilan Kepada PT Pos Indonesia (Persero) Yang Memotong/Memungut : PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2006
Lampiran XII	:	Naskah Pelengkap untuk Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23

- Lampiran XIII : Daftar Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemberi Penghasilan Kepada PT Pos Indonesia (Persero) Yang Memotong/Memungut : PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2006
- Lampiran XIV : Surat Edaran tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Dari Ditjen Pajak
- Lampiran XV : Daftar Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 Dari Ditjen Pajak
- Lampiran XVI : Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23 atas 13 Penghasilan Berupa Jasa
- Lampiran XVII : Laporan Laba Rugi Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 dan 2004
- Lampiran XVIII : Surat Keterangan Penelitian Pada PT Pos Indonesia (Persero)